

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2020

**JL. MEDAN - BANDA ACEH, KM. 381,
PAYA GAJAH, KEC. PEUREULAK
BARAT, KAB. ACEH TIMUR.**



TELP/FAX/EMAIL/WEBSITE

(0646) 7025075

Msidi.office@gmail.com

Www.Ms-idi.co.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Petunjuk Nya, Mahkamah Syar'iyah Idi telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) tahun 2020 yang intinya memuat Laporan Pencapaian Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi itu sendiri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) merupakan suatu perwujudan transparansi dan Akuntabilitas suatu lembaga, karena pada LAKjIP tahun 2020 ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun sebelumnya, dan format penyusunan LKjIP tersebut mengacu kepada contoh Format Laporan Kinerja Intansi Pemerintah yang dikirim menteri Pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi tahun 2014.


Dengan diterbitkannya **LKjIP** Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk meningkatkan Kinerja Lembaga Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga institusi peradilan tingkat Pertama.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) Mahkamah Syar'iyah Idi khususnya kepada tim penyusun **LKjIP** ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) yang sudah disusun ini belumlah begitu sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaan LAKIP. Namun demikian kami harapkan **LKjIP** ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Program Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **LAKIP** Tahun 2020 ini akan memacu kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi.

KETUA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI



HASANUDDIN, S.H.I, M.Ag f-

EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Syar'iyah Idi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambung.

Secara umum tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGE	REALISASI	%
1	Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan dalam Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Syari'yah Idi	a. Prosentase sisa tunggakan perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase perkara yang diputus Mahkah Syari'yah Idi	98 %	98 %	100 %
		d. Prosentase perkara yang diminutasi	100 %	100 %	100 %
		e. Prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	1 %	1 %	100 %
		f. Prosentase capaian kinerja Hakim	100 %	100 %	100 %
		g. Prosentase capaian kinerja Panitera Pengganti	100 %	100 %	100 %
		h. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100 %	100 %	100 %
		i. Prosentase peningkatan Pembinaan diklat di tempat kerja (DDTK)	100 %	100 %	100 %

2	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Pada Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase pengiriman salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang dikirim ke kantor Urusan Agama	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat	100 %	100 %	100 %
		d. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	100 %	100 %	100 %
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase putusan yang dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Idi	Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
5	Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
6	Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	a. Prosentase implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %
7	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum	100 %	100 %	100 %

8	Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia	a. Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau Beban Kerja dalam rangka manajemen SDM	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	100 %	100 %	100 %
9	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %
10	Peningkatan kinerja aparatur supporting unit Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase capaian kinerja Hakim	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase capaian kinerja Panitera	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase capaian kinerja Sekretaris	100 %	100 %	100 %
		d. Prosentase capaian kinerja Umum dan Keuangan	100 %	100 %	100 %
		e. Prosentase capaian kinerja Perencanaan TI dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %
		f. Prosentase capaian kinerja Kepegawaian dan Ortala	100 %	100 %	100 %
		g. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, Barang dan belanja Modal dalam satu tahun	100 %	100 %	100 %
11	Peningkatan Akuntabilitas Pegawai Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase tercapainya implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syariah Idi	100 %	100 %	100 %

		c. Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian	100 %	100 %	100 %
12	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran	100 %	100 %	100 %

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sumber daya (*stakeholder*) Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
EXECUTIVE SUMMARY	II
DAFTAR ISI	VI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
	B. Permasalahan Utama Organisasi.....	2-4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis 2015-2019.....	5
	1. Visi dan Misi	5
	2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
	B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14-16
	C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	14-16
	D. Perjanjian Kinerja.....	14-16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Pengukuran Kinerja	40
	B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	41-42
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	43
	B. Saran-Saran.....	43

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. SK Tim Penyusunan LAKIP
3. Lampiran-Lampiran Lainnya

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan dengan tegas sifat dan karakter kekuasaan kehakiman bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"(pasal 24 B ayat 1). Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga dikemukakan bahwa,"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia(pasal 1 ayat 1), sejak lahirnya Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan lahirnya undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan Undang-Undang tersebut, maka Peradilan Agama /Mahkamah Syar'iyah berkembang terus sejajar dengan peradilan lainnya diseluruh Indonesia;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh Jo. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama yang menegaskan;

- 1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- 2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- 3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh dan qanun No. 7 tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Dengan dicantulkannya Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman haruslah mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang benar, adil, jujur dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Badan Peradilan Agama yaitu dengan

lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah dan Jinayat sesuai qanun sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004, tertanggal 06 Oktober 2004, tentang pelimpahan sebahagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan adanya Qanun nomor 7 tahun 3013 dan 6 tahun 2014, tentang Hukum Acara Jinayat dan Hukum Acara Jinayat;

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya sejak tahun 2010 telah melaksanakan berbagai program terutama reformasi birokrasi dengan fokus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan system remunerasi dan manajemen dukungan Teknologi Informasi.

Dengan keluarnya PERPRES nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP maka diwajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk melaporkan Hasil Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya dengan tujuan membangun pemerintah yang akuntable dan terukur serta pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Dalam pelaksanaannya Mahkamah Syar'iyah Idi memandang bahwa reformasi birokrasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan, oleh karenanya pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prioritas penting dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu Menjadi Badan Peradilan Agama yang Agung.

Mengingat begitu banyak upaya pembenahan dan perubahan system yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan tercapainya tujuan dan hasil yang diharapkan kedepannya.

B. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI (Strategic issued)

Adapun permasalahan utama yang di hadapi yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Idi dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Kesulitan yang dialami pencari keadilan dikarenakan kurangnya sarana informasi dan pemahaman tentang prosedur berperkara.

- Jarak tempuh pencari keadilan yang sangat jauh dan terjal dan terdiri dari dua Kabupaten Kota;
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi yang belum memadai apabila dibandingkan dengan volume kerja terutama masalah perkara.
 - Masih terjadinya tumpang tindih jabatan, dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara mendalam;
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi
 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Masih banyak diantara aparat peradilan yang belum memahami sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
 - Sarana pendukung Manajemen Peradilan belum memadai
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Kondisi Halaman kantor Mahkamah Syar'iyah Idi belum tertata rapi dikarenakan tidak dianggarkan dalam DIPA untuk pembuatan paving block.
 - Anggaran yang diterima Mahkamah Syar'iyah Idi belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Sarana kerja atau mobiler sudah tidak layak pakai.

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Idi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Memaksimalkan penggunaan website Mahkamah Syar'iyah Idi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Melakukan penyuluhan Hukum dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya peningkatan tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai salah satu motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara melekat dan berkala baik untuk internal maupun eksternal dari Hakim Pengawas Bidang.
 - Mengevaluasi kinerja setiap triwulan;
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di Mahkamah Syar'iyah Idi menciptakan tertib administrasi dan manajemen peradilan.

- Melakukan pembinaan dan evaluasi setiap bulan dan kordinasi setiap triwulan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sejak Januari 2014 sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Mahkamah Syar'iyah Idi berupa Internet, Website, Siadpa Plus, SIPP dan meja informasi Mahkamah Syar'iyah Idi.
 - Dukungan anggaran yang disediakan tdak sesuaai dengan usulan yang diajukan (RAKL) tahun yang bersangkutan. Maka Mahkamah Syar'iyah Idi, sudah memaksimalkan upaya koordinasi dengan Pemerintah kabupaten Aceh Timur, sampai saat ini Pemkab. Aceh Timur tidak pernah memberikan fasilitas apapun untuk Mahkamah Syar'iyah Idi..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan 2020 - 2024

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

1. Visi dan Misi

untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024 untuk mewujudkan rencana strategis tersebut ada beberapa hal perlu diperhatikan sebagai berikut;

A. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Visi Mahkamah Syar'iyah Idi mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi yang Agung”

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melakukan aktifitasnya.Selanjutnya dalam pernyataan visi Mahkamah Syar'iyah Idi mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

- a. secara kelembagaan : Mahkamah Syar'iyah Idi adalah Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten Aceh Timur.
- b. Pengertian secara organisasional: Mahkamah Syar'iyah Idi adalah Mahkamah Syar'iyah yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Kasub, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita serta seluruh staf yang ada dimasing-masing fungsionaris tersebut;

Adapun makna perkata dari visi Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut adalah :

- a. Bersih dikandung maksud sebagai Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari KKN, pugli sebagaimana yang diharapkan oleh para pencari keadilan.
- b. Bermartabat mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik dan disegani masyarakat.
- c. Agung mengandung arti, bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi yang mempunyai kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan tanpa di intervensi oleh pihak manapun untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat;

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut :

1. Menjangan Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan .
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan Mahkamah Syar'iyah.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Idi. Tujuan yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut :
 1. Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga penegak hukum yang Bersih, Bermartabat dan Agung dengan diterapkannya sistem Peradilan yang Cepat, Transparan dan Akuntable;
 2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Pencari Keadilan;
 3. Mewujudkan Birokrasi yang Modern dengan mengedepankan Indepedensi, Integritas, Budaya Kerja pada Mahkamah Syar'iyah Idi.
- B. Sasaran Srategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara
 2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan
 5. Peningkatan Askseibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)
 6. Peningkatan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tupoksi Mahkamah Syar'iyah Idi
 7. Peningkatan Sarana dan Prasaranadalam Menunjang Pelaksanaan Tupoksi Mahkamah Syar'iyah Idi.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Idi dan RPJM 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : W1-A14/0001/OT.00/II/2016 Tanggal 04 Januari 2016. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Mahkamah Syar'iyah Idi. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase sisa perkara tunggakan yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara tunggakan yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diregister dengan perkara yang diminutasi.	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Prosentase perkara yang diputus Mahkamah Syar'iyah Idi kurang dari 5 (lima) bulan	Perbandingan perkara yang diputus kurang dari 5 (lima) bulan dengan yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		d. Prosentase perkara yang diputus	Perbandingan perkara yang putus telah diminutasi dan perkara yang diputus belum diminutasi	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		e. Prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan	Perbandingan antara perkara tahun lalu yang Banding, Kasasi dan PK dengan perkara yang Banding, Kasasi dan PK pada tahun berjalan	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

		f. Prosentase capaian kinerja Hakim	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Hakim	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		g. Prosentase capaian kinerja kinerja Panitera Pengganti	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Panitera Pengganti	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		h. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Kepaniteraan	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		i. Prosentase peningkatan Pembinaan ditempat kerja (DDTK)	Perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah pelaksanaan Pembinaan ditempat kerja (DDTK)	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Kegiatan
2	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Pada Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang telah diserahkan sesuai dengan SOP.	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Prosentase pengiriman berkas dan salinan putusan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama	Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah berkas dan salinan putusan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama sesuai dengan SOP.	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat	Perbandingan implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat dengan Standar Operating Prosedur pelaporan perkara	Pansek Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	Perbandingan jumlah perkara yang sudah diminutasi dengan jumlah perkara yang telah masuk di box arsip sesuai dengan SOP	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
3	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Mahkamah Syar'iyah Idi (Acces to Justice)	Prosentase putusan yang dipublikasikan	Perbandingan putusan yang sudah diminutasi dengan putusan yang dipublikasikan pada website Mahkamah Syar'iyah Idi sesuai dengan SOP	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahun
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Idi	Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan survei kepuasan masyarakat dengan pelaksanaan pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Standar Pelayanan di Mahkamah
5	Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Perbandingan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan realisasinya	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Kegiatan
		b. Prosentase implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Kegiatan
6	Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	a. Prosentase Implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Perbandingan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan realisasinya	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Dokumen Peraturan Perundang-undangan

	undangan	b. Prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan	Perbandingan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasinya	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Website Mahkamah Syar'iyah Idi
7	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan Standar Operating Prosedur Tugas Pokok dan Fungsi dengan pelaksanaannya	Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi
		b. Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum	Perbandingan antara efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan manajemen perkara dan administrasi umum dengan mutu baku Standar Operational Prosedur (SOP)	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
8	Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia	a. Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau Beban Kerja dalam rangka Manajemen SDM	Perbandingan pencapaian target Sasaran Kinerja Pegawai dengan Analisis Beban Kerja	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Database Kepegawaian
		b. Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	Perbandingan validasi dan penyajian data pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dengan realisasinya	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Database Kepegawaian

		c. Prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	Perbandingan implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan penjatuhan hukuman disiplin	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Database Kepegawaian
9	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang	Perbandingan antara hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Hasil Pengawasan
		b. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan laporan pengaduan yang diterima	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Hasil Pengawasan
10	Peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase capaian kinerja Hakim	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Hakim	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		b. Prosentase capaian kinerja Panitera	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Panitera	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		c. Prosentase capaian kinerja Sekretaris	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Sekretaris	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		d. Prosentase capaian kinerja Pejabat Bidang umum dan Keuangan	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Bidang Umum dan Keuangan	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		e. Prosentase capaian kinerja Pejabat Perencanaan TI dan Pelaporan	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

		f. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Kepegawaian	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Bidang Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		g. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, barang, dan Modal dalam satu tahun	Perbandingan target output kinerja anggaran dengan realisasi output kinerja anggaran di RKAKL dan/ atau DIPA	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Monev
11	Peningkatan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase tercapainya implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur	Perbandingan implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dengan capaian target output Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ketua terukur dan gan capaian target output Indikator	Laporan RB dan Dokumen IKU
		b. Prosentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan, Triwulan, semesteran dan Tahunan
		c. Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian	Perbandingan implementasi kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dengan hasil review Laporan Keuangan	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Review Laporan Keuangan dan BMN

12	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi dengan realisasinya	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
		b. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran	Perbandingan target output kinerja anggaran dengan realisasi output kinerja di RKAKL dan/ atau DIPA	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Monev

C. Rencana Kinerja Tahunan 2021

Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 –2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2020 Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase sisa perkara tunggakan yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Prosentase perkara yang diputus tingkat pertama kurang dari 5 (lima) bulan	98 %
		d. Prosentase perkara yang diminutasi	100 %
		e. Prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	1 %
		f. Prosentase capaian kinerja hakim	100 %
		g. Prosentase capaian Kinerja panitera Pengganti	100 %
		h. Prosentase capaian kinerja pejabat dan staf kepaniteraan	100 %
		i. Prosentase peningkatan pembinaan ditempat kerja (DDTK)	100 %

2	Peningkatan tertib administrasi perkara pada Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		b. Prosentase pengiriman salinan putusan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama	95 %
		c. Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat	100 %
		d. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	99 %
3	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Mahkamah Syariah Idi (Acces to Justice)	a. Prosentase putusan tingkat pertama yang dipublikasikan	100 %
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Mahkamah Syariah Idi	95 %
5	Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	95 %
		b. Prosentase implementasi Program Anti Korupsi di Mahkamah Syariah Idi	100 %
6	Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	a. Prosentase implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %
		b. Prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100 %
7	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syariah Idi	100%
		b. Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum	100 %
8	Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia	a. Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau beban kerja dalam rangka manajemen SDM	100 %
		b. Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	100 %
		c. Prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	100%
9	Penguatan Terhadap Pengawasan pelaksanaan	a. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang.	100 %

	TUPOKSI dan Supporting Unit.	b. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
10	Peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase capaian kinerja Hakim	100 %
		b. Prosentase capaian kinerja Panitera	100 %
		c. Prosentase capaian kinerja Sekretaris	100 %
		d. Prosentase capaian kinerja Bidang Umum dan Keuangan	100 %
		e. Prosentase capaian kinerja Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan	100 %
		f. Prosentase capaian kinerja Bidang Kepegawaian dan ortala	100 %
		g. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, barang dan Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	99 %
11	Peningkatan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase Tercapainya Implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.	98 %
		b. Prosentase efektifitas Laporan akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	100%
		c. Prosentase implementas kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	100%
12	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah idi	a. Presentase efektifitas Implementasi E – Procurement Barang / Jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %
		b. Prosentase capaian Kinerja Anggaran belanja Modal satu tahun anggaran	100 %

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Mahkamah Syar'iyah Idi membuat perjanjian yang akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya berikut lampiran perjanjian Tersebut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase sisa perkara tunggakan yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Prosentase perkara yang diputus tingkat pertama kurang dari 5 (lima) bulan	100 %
		d. Prosentase perkara yang diminutasi	100 %
		e. Prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	1 %
		f. Prosentase capaian kinerja hakim	100 %
		g. Prosentase capaian Kinerja panitera Pengganti	100 %
		h. Prosentase capaian kinerja pejabat dan staf kepaniteraan	100 %
		i. Prosentase peningkatan pembinaan ditempat kerja (DDTK)	100 %
		2	Peningkatan tertib administrasi perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi
b. Prosentase pengiriman salinan putusan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama	95 %		
c. Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat	100 %		
d. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	99 %		
3	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Mahkamah Syar'iyah Idi (Acces to Justice)	a. Prosentase putusan tingkat pertama yang dipublikasikan	100 %
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %
5	Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	95 %

		b. Prosentase implementasi Program Anti Korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %
6	Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	a. Prosentase implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %
		b. Prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100 %
7	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi	100%
		b. Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum	100 %
8	Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia	a. Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau beban kerja dalam rangka manajemen SDM	100 %
		99 Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	100 %
		100 Prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	100 %
9	Penguatan Pengawasan Terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit.	a. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang.	100 %
		b. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
10	Peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	h. Prosentase capaian kinerja Hakim	100 %
		i. Prosentase capaian kinerja Panitera	100%
		j. Prosentase capaian kinerja Sekretaris	100%
		k. Prosentase capaian kinerja Bidang Umum dan Keuangan	100%
		l. Prosentase capaian kinerja Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan	100%
		m. Prosentase capaian kinerja Bidang Kepegawaian dan ortala	100 %
		n. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, barang dan Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	100 %
11	Peningkatan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase Tercapainya Implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.	100 %
		d. Prosentase efektifitas Laporan akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	100%

		e. Prosentase implementas kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	100%
12	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	c. Presentase efektifitas Implementasi E – Procurement Barang / Jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %
		d. Prosentase capaian Kinerja Anggaran belanja Modal satu tahun anggaran	100 %

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Anggaran

Rp. 2.393.296.000

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Rp. 1.196.353.000

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp. 37.500.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2016 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGE	REALISASI	%
1	Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan dalam Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Syari'yah Idi	a. Prosentase sisa tunggakan perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase perkara yang diputus Mahkah Syari'yah Idi	98 %	98 %	90 %
		d. Prosentase perkara yang diminutasi	100 %	100 %	100 %
		e. Prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	1 %	1 %	100 %
		f. Prosentase capaian kinerja Hakim	100 %	100 %	100 %
		g. Prosentase capaian kinerja Panitera Pengganti	100 %	100 %	100 %
		h. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100 %	100 %	100 %
		i. Prosentase peningkatan Pembinaan diklat di tempat kerja (DDTK)	100 %	98 %	98 %
		2	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Pada Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke Majelis	100 %
b. Prosentase pengiriman salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang dikirim ke kantor Urusan Agama	100 %			100 %	100 %

		c. Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat	100 %	100 %	100 %
		d. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	99 %	99 %	100 %
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase putusan yang dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Idi	Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	95 %	95 %	100 %
5	Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	95 %	95 %	100 %
		b. Prosentase implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
6	Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	a. Prosentase implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %
7	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum	100 %	100 %	100 %
8	Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia	a. Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau Beban Kerja dalam rangka manajemen SDM	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	100 %	100 %	100 %

		c. Prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	100 %	100 %	100 %
9	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %
10	Peningkatan kinerja aparatur supporting unit Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase capaian kinerja Hakim	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase capaian kinerja Panitera	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase capaian kinerja Sekretaris	100 %	100 %	100 %
		d. Prosentase capaian kinerja Umum dan Keuangan	100 %	98 %	98 %
		e. Prosentase capaian kinerja Perencanaan TI dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %
		f. Prosentase capaian kinerja Kepegawaian dan Ortala	100 %	100 %	100 %
		g. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, Barang dan belanja Modal dalam satu tahun	99 %	99 %	100 %
11	Peningkatan Akuntabilitas Pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase tercapainya implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur	99 %	99 %	100 %
		b. Prosentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian	100 %	100 %	100 %

12	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran	100 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan dalam Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase perkara yang diputus kurang dari 5 (lima) bulan	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase perkara yang diminutasi	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	1 %	1 %	100 %
6	Prosentase capaian kinerja Hakim	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase capaian kinerja Panitera Pengganti	100 %	100 %	100 %
8	Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100 %	100 %	100 %
9	Prosentase peningkatan Pembinaan Diklat di tempat Kerja (DDTK)	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase sisa tunggakan perkara yang diselesaikan** pada tahun 2020 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2019 sebanyak **12 perkara** dan telah diselesaikan pada tahun 2020. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase sisa tunggakan perkara yang diselesaikan** pada tahun 2020. Adapun data keadaan perkara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

Jenis Perkara	Sisa Awal	Diterima	Diputus	Sisa Akhir
PERDATA				
Izin Poligami	-	1	1	0
Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
Penolakan Perkawinan	-	-	-	-
Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
Kelalaian Atas Kewajiban	-	-	-	-
Cerai Talak	-	97	96	1
Cerai gugat	12	361	367	5
Harta Bersama	-	8	7	1
Penguasaan Anak/Hadhanah	-	5	5	0
Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak mampu	-	-	-	-
Hak – hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-
Pengesahan anak	-	-	-	-
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-
Perwalian	-	6	6	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	-	-	-	-
Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-
Asal Usul Anak	-	-	-	-
Perkawinan Campuran	-	-	-	-
Isbat Nikah	-	26	26	0
Dispensasi Kawin	-	45	45	0
Izin Kawin	-	-	-	-
Wali Adhal	-	1	1	0
Kewarisan	-	3	2	1
Wakaf	-	-	-	-
Penetapan Ahli Waris	-	33	33	0
Hibah	-	-	-	-
Ekonomi Syariah	-	2	2	0
JINAYAT				
Ikhtilath	-	-	-	-
Khalwat	-	1	-	1
Khamar	-	-	-	-
Liwath	-	-	-	-
Maisir	-	2	2	0

Musahaqah	-	-	-	-
Pelecehan Seksual	-	6	3	3
Pemeriksaan	-	8	7	1
Qadhaf	-	-	-	-
Zina	-	2	2	0
Jumlah	12	607	606	13

(sumber data : Laporan Tahunan 2020)

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase sisa tunggakan perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase sisa tunggakan perkara yang diselesaikan berbanding sama dengan capaian indikator kinerja prosentase sisa tunggakan perkara yang diselesaikan pada tahun 2020, sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	-



2. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 memenuhi target. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 588 perkara dan diputus sebanyak 580 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2020 sebanyak 8 perkara. Hal itu dapat dilihat tabel data keadaan perkara pada tahun 2020 berikut di bawah ini:

KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

Jenis Perkara	Sisa Awal	Diterima	Diputus	Sisa Akhir
PERDATA				
Izin Poligami	-	1	1	0
Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
Penolakan Perkawinan	-	-	-	-
Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
Kelalaian Atas Kewajiban Suami /Isteri	-	-	-	-
Cerai Talak	-	97	96	1
Cerai gugat	12	361	367	5
Harta Bersama	-	8	7	1
Penguasaan Anak/Hadhanah	-	5	5	0
Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah tidak mampu	-	-	-	-
Hak – hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-
Pengesahan anak	-	-	-	-
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-
Perwalian	-	6	6	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	-	-	-	-
Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-
Asal Usul Anak	-	-	-	-
Perkawinan Campuran	-	-	-	-
Isbat Nikah	-	26	26	0
Dispensasi Kawin	-	45	45	0
Izin Kawin	-	-	-	-
Wali Adhal	-	1	1	0
Kewarisan	-	3	2	1
Penetapan Ahli Waris	-	33	33	0
Hibah	-	-	-	-

Wakaf	-	-	-	-
Ekonomi Syariah	-	2	2	0
Lain-lain				
JINAYAT				
Ikhtilath	-	-	-	-
Khalwat	-	1	-	1
Khamar	-	-	-	-
Liwath	-	-	-	-
Maisir	-	2	2	0
Musahaqah	-	-	-	-
Pelecehan Seksual	-	6	3	3
Pemeriksaan	-	8	7	1
Qadhaf	-	-	-	-
Zina	-	2	2	0
Jumlah	12	607	606	13

(sumber data : Laporan Tahunan 2020)

Target penyelesaian perkara pada tahun 2020 terpenuhi sebesar 97 % dari jumlah perkara sisa tahun 2019 sejumlah 12 perkara dan perkara yang diterima tahun 2020 sejumlah 607 perkara, sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2020 sebesar 98 % (606 perkara). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase perkara yang diselesaikan** pada tahun 2020 terpenuhi. Adapun data penyelesaian perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERKARA PUTUS TAHUN 2020

Jenis Perkara	Perkara diterima tahun 2020	Perkara diputus Tahun 2020	Sisa perkara Tahun 2020	Ket
PERDATA				
Izin Poligami	1	1	-	-
Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
Penolakan Perkawinan	-	-	-	-
Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
Kelalaian Atas Kewajiban Suami /Isteri	-	-	-	-

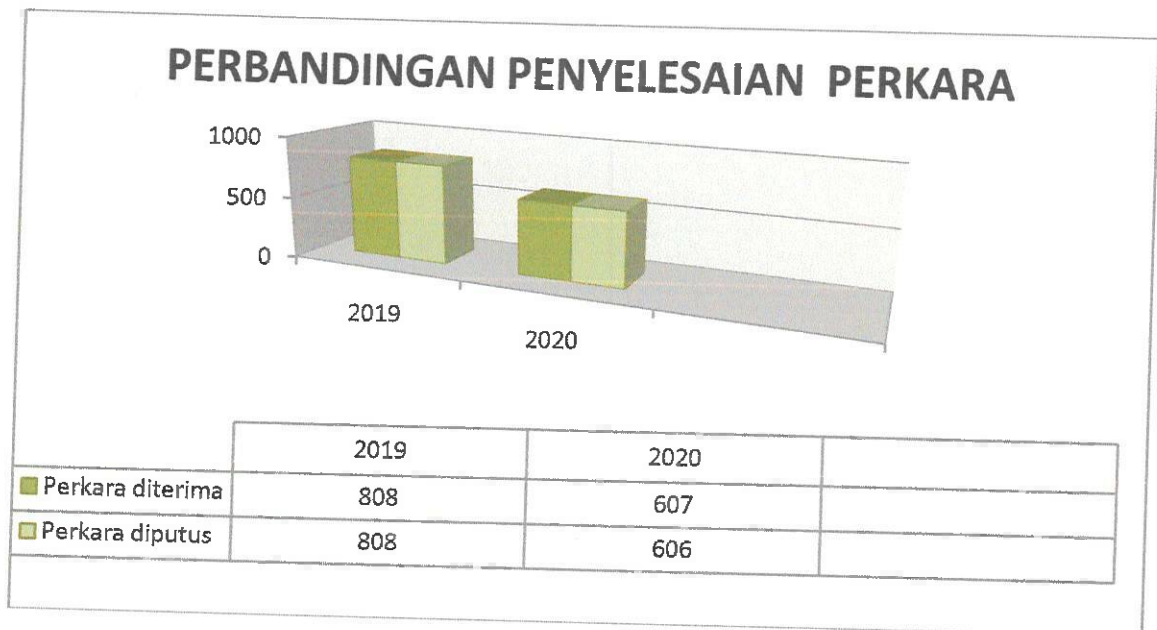
Cerai Talak	97	96	1	-
Cerai gugat	361	356	5	-
Harta Bersama	8	7	1	-
Penguasaan Anak/Hadhanah	5	5	0	-
Hak – hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-
Pengesahan Anak	-	-	-	-
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-
Perwalian	6	6	0	-
Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
Penunjukan Orang Lain Sebagai wali Oleh Pengadilan	-	-	-	-
Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-
Asal Usul Anak	-	-	-	-
Perkawinan Campuran	-	-	-	-
Isbat Nikah	26	26	0	-
Izin Kawin	-	-	-	-
Dispensasi Kawin	45	45	0	-
Wali Adhal	1	1	0	-
Kewarisan	3	2	1	-
Wasiat	-	-	-	-
Penetapan Ahli Waris	33	33	0	-
Hibah	-	-	-	-
Wakaf	-	-	-	-
Ekonomi Syariah	2	2	0	-
Lain – Lain (daden Verzet)	-	-	-	-
JINAYAT				
Ikhtilath	-	-	-	-
Khalwat	-	1	-	1
Khamar	-	-	-	-
Liwath	-	-	-	-
Maisir	-	2	2	0
Musahaqah	-	-	-	-
Pelecehan Seksual	-	6	3	3
Pemeriksaan	-	8	7	1
Qadhaf	-	-	-	-

Zina	-	2	2	0
Jumlah	12	607	606	13

(sumber data : Laporan Tahunan 2020)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja **prosentase perkara yang diselesaikan** pada tahun 2020 tercapai sebesar 97 %. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase perkara yang diselesaikan** pada tahun 2020 mengalami penurunan 1,04 % dibandingkan pencapaian pada tahun 2019. Lihat tabel dan grafik berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase perkara yang diselesaikan	88,4 %	87 %	1,04 %



3. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase perkara yang diputus kurang dari 5 (lima) bulan** pada tahun 2017 terpenuhi target, dari target sebesar 97 %, terpenuhi sebesar 97 %. Sebagaimana tabel berikut ini:

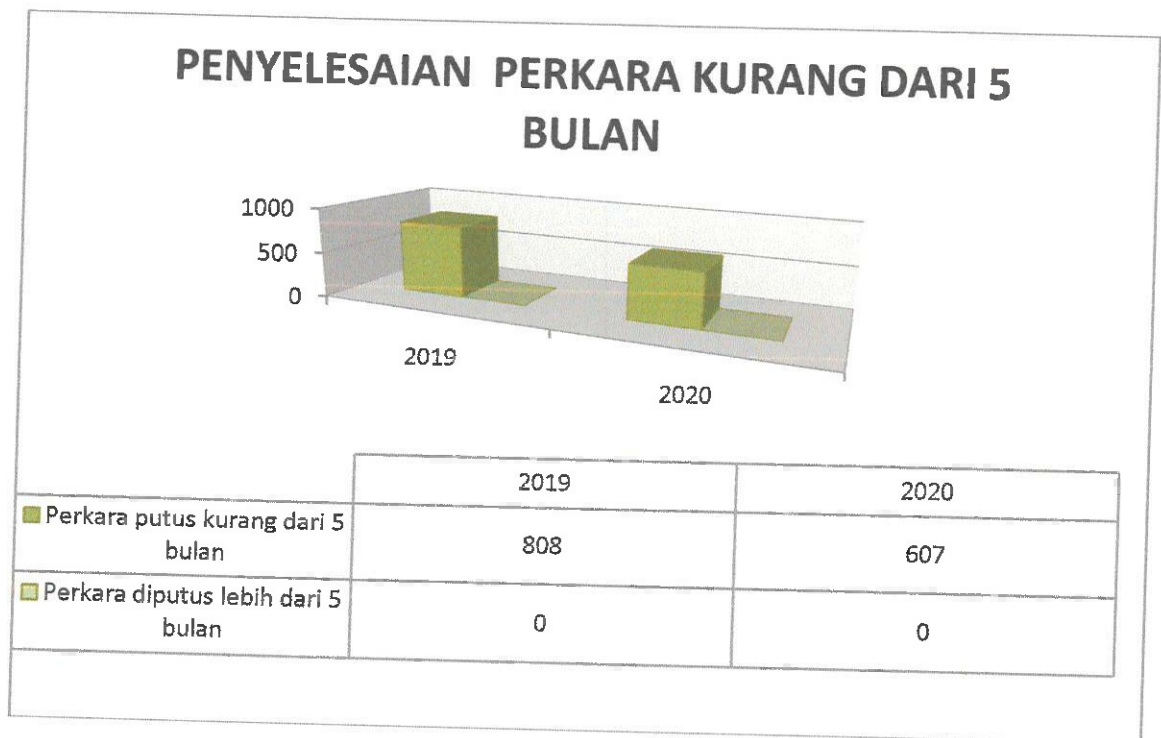
Sisa Awal	Diterima	Jangka Waktu Penyelesaian		Ket.
		< 5 Bulan	> 5 bulan	
1	2	3	4	6
12	607	606	-	

(sumber data : Laporan Tahunan 2020)

Penyelesaian perkara kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun 2020 hanya terealisasi sejumlah

588 perkara atau sebesar 94,3 %. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase perkara yang diputus Mahkamah Syar'iyah Idi kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun 2020. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase perkara yang diputus Mahkamah Syar'iyah Idi kurang dari 5 (lima) bulan mengalami kenaikan sebesar 1,98 % jika diperbandingkan dengan tahun 2019. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase perkara yang diputus tingkat Perkara putus kurang dari 5 (lima) bulan	92,6 %	94,3 %	1,98 %



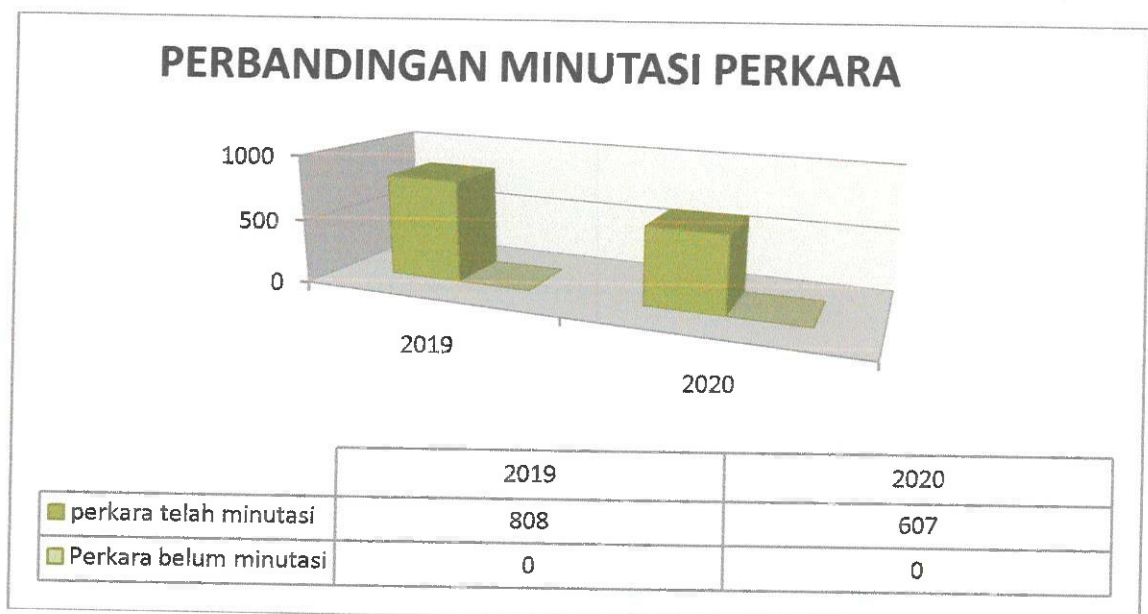
4. Tingkat capaian Indikator kinerja Prosentase Perkara yang di minutasasi pada tahun 2020 tidak terpenuhi target sebesar 98 %. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini:

Perkara Putus Sisa Tahun 2019	Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah	Telah Diminutasi	Belum Diminutasi	Ket.
1	2	3 (1+2)	4	5	6
12	606	618	618	0	

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Dalam Laporan Tahunan tersebut di atas dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 618 perkara dan telah diminutasi sebanyak 618 perkara. Dan hal tersebut jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase perkara yang diminutasi** pada tahun 2020 berbanding sama, karena pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase perkara yang diminutasi** pada tahun 2020 sebesar 98 %. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Sama
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase perkara yang diminutasi	98 %	98 %	0 %



5. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)** pada tahun 2020]memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan perkara yang banding sebesar 1 %, sedangkan target putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK) sebesar 1 %, sehingga **perkara banding berbanding sama 1 %** dari target putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK) tersebut. Sebagai

- informasi bahwa perkara yang banding didominasi perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Idi notabene masyarakat pencari keadilan pada daerah tersebut tingkat pendidikannya cukup tinggi sehingga berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum.
6. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Hakim** pada tahun 2020 tidak terpenuhi target sebesar 100 %. Hal tersebut dikarenakan target capaian indikator dimaksud sebesar 100 %, sedangkan realisasi capaian kinerja hakim sebesar 100 %. terpenuhinya capaian kinerja hakim sebesar 100 % tersebut, dikarenakan pertama, Standar Operating Prosedur (SOP) penyelesaian perkara dibatasi 5 (Lima) bulan harus selesai. Kedua, apabila ada putusan sela dan/ atau Majelis Hakim yang menanganinya memerlukan pemeriksaan tambahan, maka dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim, tidak dikembalikan ke para pihak
 7. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Panitera Pengganti** pada tahun 2020 tidak terpenuhi target sebesar 100 %. Hal tersebut dikarenakan masing-masing panitera pengganti dalam Sasaran Kerja Pegawai menargetkan penyelesaian perkara sejumlah 89 % dan terealisasi sebesar 99 %.
 8. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja pejabat dan staf kepaniteraan** pada tahun 2020 tidak terpenuhi target sebesar 100 %. Hal tersebut dapat dijelaskan, bahwa kinerja pejabat dan staf kepaniteraan dalam menyelesaikan TUPOKSI sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2020. Terbukti dalam Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2020 secara kuantitas dan kualitas rata-rata nilai di atas 80.
 9. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase peningkatan Pembinaan diklat di tempat kerja (DDTK)** pada tahun 2020 terpenuhi target sebesar 100 %. Hal tersebut dapat dijelaskan, bahwa dalam perencanaan pembinaan teknis yustisial ditargetkan 2 kali pelaksanaan bimbingan teknis. Namun demikian dalam realisasinya dapat dilaksanakan 3 kali, salah satunya bekerjasama dengan para Narasumber Operator Pelatihan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke Majelis	100 %	100 %	100 %

2	prosentase pengiriman salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi cerai gugat dan cerai talak yang dikirim ke Kantor Urusan Agama	95 %	98 %	103 %
3	Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	99 %	97 %	98 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke majelis** pada tahun 2020 telah memenuhi target 100 %. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang diterima sejumlah 607 perkara dan telah teregistrasi sebagai perkara di Mahkamah Syar'iyah Idi. Sebagaimana tabel berikut:

KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

Jenis Perkara	Sisa tahun 2019	Diterima tahun 2020	Jumlah	Ket
PERDATA				
Izin Poligami	-	-	-	-
Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
Penolakan Perkawinan	-	-	-	-
Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
Kelalaian Atas Kewajiban	-	-	-	-
Cerai Talak	-	97	97	-
Cerai gugat	12	361	373	-
Harta Bersama	-	8	8	-
Penguasaan Anak/Hadhanah	-	5	5	-
Hak – hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-
Pengesahan Anak	-	-	-	-
Pencabutan Kekuasaan Orang	-	-	-	-
Perwalian	6	6	6	-
Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
Penunjukan Orang Lain	-	-	-	-
Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-
Asal Usul Anak	-	-	-	-
Perkawinan Campuran	-	-	-	-
Isbat Nikah	-	26	26	-
Izin Kawin	-	-	-	-
Dispensasi Kawin	-	45	45	-
Wali Adhal	-	1	1	-
Kewarisan	-	3	2	-
Penetapan Ahli Waris	-	26	26	-
Hibah	-	-	-	-
Lain – Lain (daden Verzet)	-	-	-	-

JINAYAT				
Ikhtilath	-	-	-	-
Khalwat	-	1	-	1
Khamar	-	-	-	-
Liwath	-	-	-	-
Maisir	-	2	2	0
Musahaqah	-	-	-	-
Pelecehan Seksual	-	6	3	3
Pemeriksaan	-	8	7	1
Qadhaf	-	-	-	-
Zina	-	2	2	0
Jumlah	12	607	606	13

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke majelis** pada tahun 2020 sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke majelis	100 %	100 %	-

2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase pengiriman salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi cerai gugat dan cerai talak yang dikirim ke Kantor Urusan Agama** pada tahun 2020 Tidak melebihi target sebesar 100 %. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sisa Tahun 2019	Diterima Tahun 2020	Jumlah Putus	Salinan putusan telah dikirim Ke KUA	Salinan Putusan belum dikirim Ke KUA	Ket.
1	2	3	4	5	6
12	608	607	619	0	

(sumber data : Laporan Tahunan 2017)

Hal ini mencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase salinan putusan kepada yang dikirim ke Kantor Urusan Agama** pada tahun 2020 sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Penurunan
	Tahun 2019	Tahun 2020	

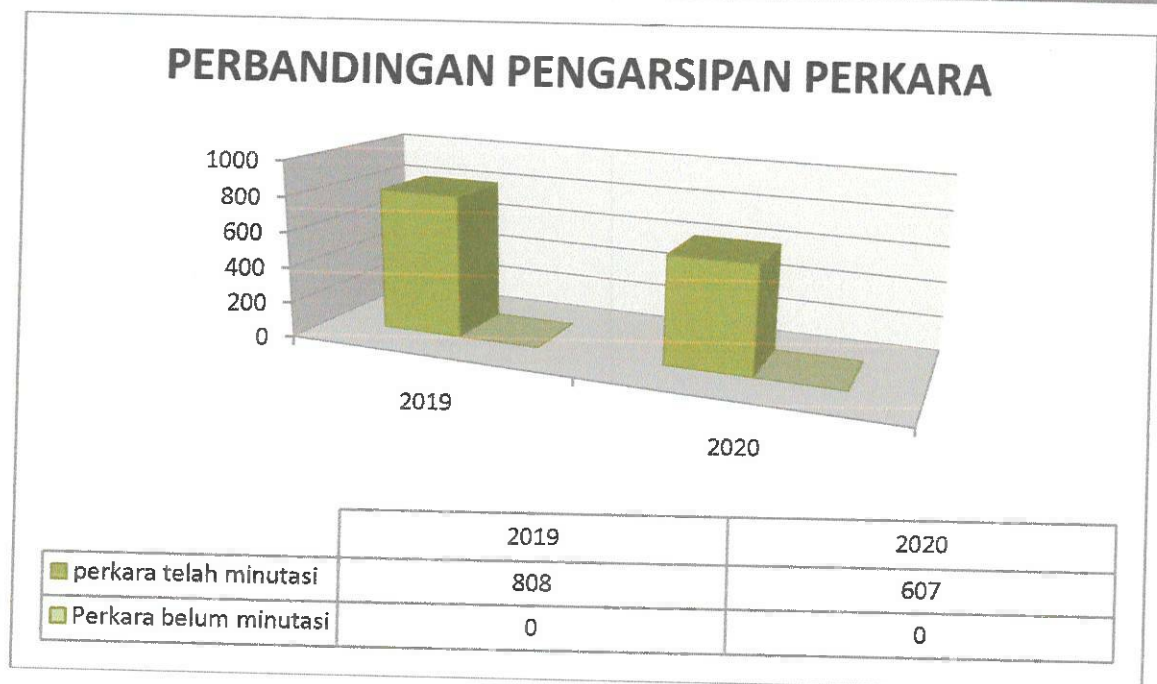
Prosentase pengiriman berkas dan salinan putusan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama	97 %	100 %	100 %
--	------	-------	-------

- Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat pada tahun 2020 memenuhi target sebesar 100%.**
- Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase berkas perkara yang masuk box arsip pada tahun 2020 tidak memenuhi target sebesar 99 %.** Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sisa Berkas Perkara Diminutasi tahun 2019 belum masuk box arsip	Berkas Perkara Diminutasi Tahun 2019 sudah masuk box arsip	Berkas Perkara Diminutasi Tahun 2020 sudah masuk box arsip	Berkas Perkara diminutasi Tahun 2020 belum masuk box arsip	Ket.
1	2	3	4	5
12	808	607	13	

Dan jika hal itu diperbandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase berkas perkara yang masuk box arsip pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2 % dari tahun 2019.** Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	95 %	99%	2 %



Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (aces to justice

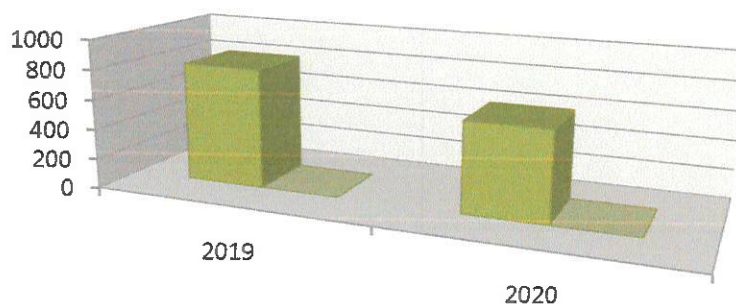
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase putusan yang dipublikasikan	100 %	100 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase putusan yang dipublikasikan** pada tahun 2020 memenuhi target sebesar 100 %. Putusan perkara pada tahun 2020 sebanyak 607 perkara dan yang sudah dianonimisasi serta dipublikasikan dalam website Mahkamah Syar'iyah Idi sebanyak 607 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase putusan yang dipublikasikan** tahun 2020 tercapai sebesar 100 %. Dan hal itu juga dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase putusan yang dipublikasikan** pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		penurunan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase putusan yang dipublikasikan	100 %	100 %	100 %

PUBLIKASI PUTUSAN



	2019	2020
Putusan Sudah Dipublikasikan	808	606
Putusan Belum Dipublikasikan	0	0

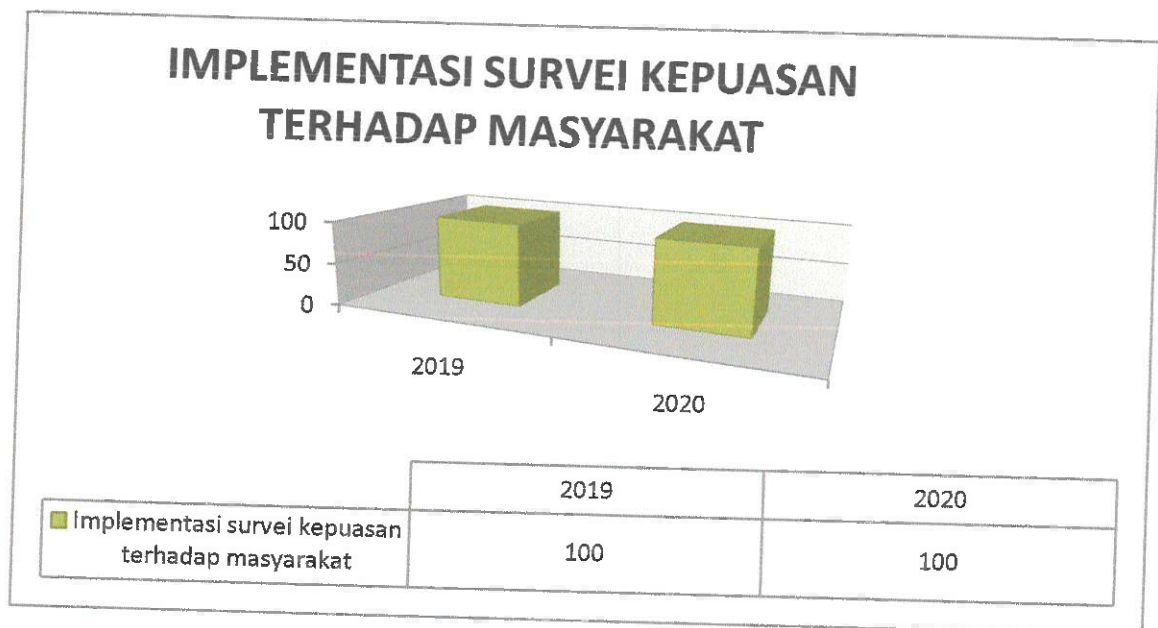
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Idi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	-

1. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2020 memenuhi target. Pada tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Idi sudah melakukan survei terhadap kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi. Tahun 2019 mahkamah syar'iyah idi sudah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Mahkamah Syar'iyah Idi, Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	100%	100 %	100 %



Sasaran Strategis 5 : Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syar'iyah Idi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	95%	95 %	100 %
2	Prosentase implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)** tahun 2020 sudah memenuhi target. Hal tersebut disebabkan karena sudah efektifnya sistem pengendalian internal yang dimiliki satker Mahkamah Syar'iyah Idi. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)** tahun 2020 sudah tercapai sebesar 100 %.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi** pada tahun 2020 telah memenuhi target. Hal tersebut terbukti pada tahun 2020, sudah dilakukan langkah-langkah preventif di antaranya sudah dilakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dan himbauan untuk tidak melakukan perbuatan KKN dengan pemasangan banner serta tidak ada indikasi dan fakta, aparatur Mahkamah Syar'iyah Iditersangkut permasalahan hukum berkaitan dengan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi** tahun 2020 tercapai sebesar 100%.

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan penataan dan pengelolaan peraturan perundang - undangan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan** tahun 2020 memenuhi target 100 %. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap ada peraturan perundang-undangan baru dan/ atau setiap hakim/pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti sosialisasi/diklat/bimtek dari Mahkamah Agung maupun dari Lembaga/Kementerian lain segera mengimplementasikan dengan mengadakan sosialisasi hasil mengikuti sosialisasi/diklat/bimtek tersebut di Mahkamah Syar'iyah Idi yang diikuti pimpinan/pejabat/pegawai Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan** pada tahun 2020 telah memenuhi target 100 %. Setiap ada peraturan perundang-undangan baru, terdokumentasikan di perpustakaan Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah dikelola dengan baik serta untuk peraturan yang berkaitan teknis pelaksanaan tupoksi terdokumentasi di masing-masing Bidang

Sasaran Strategis 7 : Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Idi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum	100 %	100 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi** tahun 2020 sudah memenuhi target. Hal tersebut disebabkan karena Aparatur yang sudah memahami terhadap pentingnya pelayanan cepat dan efisien, sehingga berakibat sudah efektifnya implementasi Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi** tahun 2020 hanya tercapai sebesar 100 %.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum** pada tahun 2020 telah memenuhi target. Dalam melaksanakan TUPOKSI semua aparaturnya termasuk di

dalamnya hakim untuk melaksanakan tugasnya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Memperhatikan kinerja yang dilakukan oleh aparatur peradilan tidak mengalami hambatan dan kesulitan dengan adanya Teknologi Informasi. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum tahun 2020** tercapai sebesar 100 %.

Sasaran Strategis 8 : Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau Beban Kerja dalam rangka manajemen SDM	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	100 %	100 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau Beban Kerja dalam rangka manajemen SDM** tahun 2020 memenuhi target. Sasaran Kinerja Pegawai pada masing-masing aparatur Mahkamah Syar'iyah Iditelah dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dan realisasi beban kinerja pegawai serta pengukuran perilaku memenuhi target yang telah ditentukan. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau Beban Kerja dalam rangka manajemen SDM** tahun 2020 tercapai sebesar 100 %.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Kepegawaian (SIKEP)** pada tahun 2020 telah memenuhi target. Hal tersebut terbukti pada tahun 2020, sudah dilakukan langkah-langkah preventif di antaranya sudah dilakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dan himbauan untuk tidak melakukan perbuatan KKN dengan pemasangan banner serta tidak ada indikasi dan fakta,

aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi tersangkut permasalahan hukum berkaitan dengan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Kepegawaian (SIKEP)** tahun 2020 tercapai sebesar 100%.

3. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010** pada tahun 2020 sudah memenuhi target. Hal tersebut disebabkan karena sistem penegakan disiplin PNS pada Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah dilaksanakan secara optimal, terbukti masih adanya aparatur peradilan, baik hakim/pejabat/staf yang belum disiplin melaksanakan kewajiban sebagai PNS. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010** tahun 2020 baru tercapai sebesar 100 %.

strategis 9 : Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang** tahun 2020 sudah memenuhi target. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang** tahun 2020 sudah tercapai 100%.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti** pada tahun 2020 telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dijelaskan karena semua pengaduan sudah ditindaklanjuti, yaitu tidak ada pengaduan dan semuanya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti** tahun 2020 tercapai sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti** pada tahun 2020 adalah sama. Untuk lebih jelas melihat perbandingannya

dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		penurunan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	-

Sasaran Strategis 10 : Peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase capaian kinerja hakim	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase capaian kinerja panitera	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase capaian kinerja sekretaris	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Umum dan Keuangan	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, barang dan Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	100 %	99 %	100 %

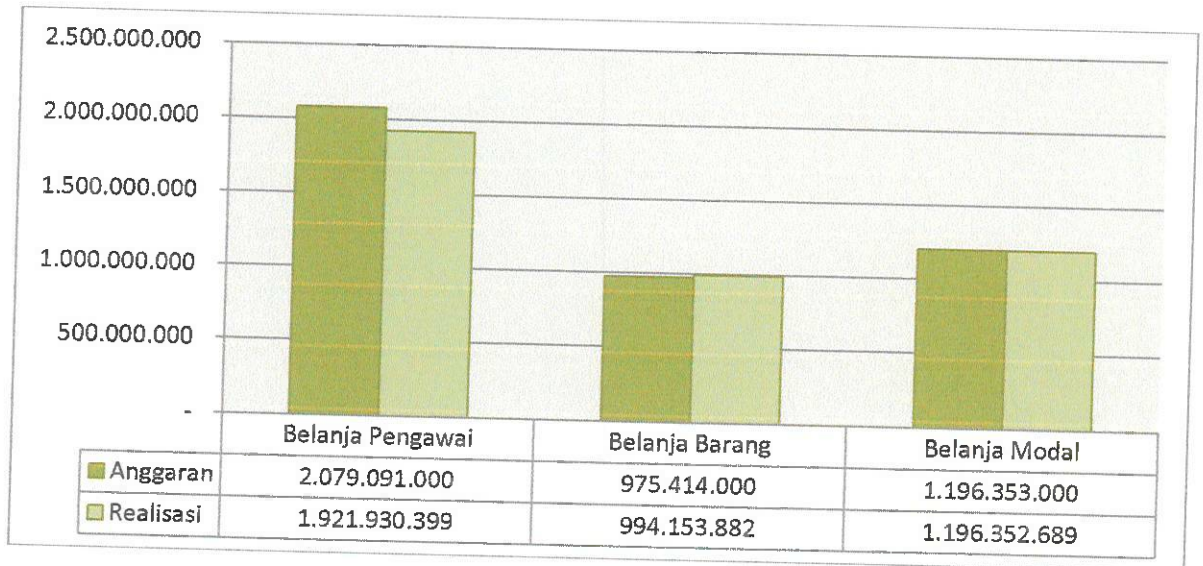
1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja hakim** tahun 2020 memenuhi target. Hal tersebut karena dalam pelaksanaan kinerja Hakim sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedur. Di samping itu, target dalam Sasaran Kerja Pegawai Hakim rata-rata nilainya di atas 90 %. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase capaian kinerja hakim** pada tahun 2020 tercapai 98 %.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja panitera** tahun 2020 memenuhi target. Hal tersebut karena dalam pelaksanaan kinerja Umum dan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedur. Di samping itu, target dalam Sasaran Kerja Pegawai pada bidang Umum dan keuangan rata-rata nilainya di atas 85%. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Umum dan Keuangan** pada tahun 2020 tercapai 98 %.

3. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Sekretaris** tahun 2020 memenuhi target. Hal tersebut karena dalam pelaksanaan kinerja Umum dan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedur. Di samping itu, target dalam Sasaran Kerja Pegawai pada bidang Umum dan keuangan rata-rata nilainya di atas 85%. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Umum dan Keuangan** pada tahun 2020 tercapai 98 %.
4. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Umum dan Keuangan** tahun 2020 memenuhi target. Hal tersebut karena dalam pelaksanaan kinerja Umum dan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedur. Di samping itu, target dalam Sasaran Kerja Pegawai pada bidang Umum dan keuangan rata-rata nilainya di atas 90 %. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Umum dan Keuangan** pada tahun 2020 tercapai 98 %.
5. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan** tahun 2020 memenuhi target. Hal tersebut karena dalam pelaksanaan kinerja bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedur. Di samping itu, target dalam Sasaran Kerja Pegawai pada bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan rata-rata nilainya di atas 98 %. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan** pada tahun 2020 tercapai 100%.
6. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** tahun tahun 2020 telah memenuhi target. Hal tersebut karena dalam pelaksanaan kinerja bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedur. Di samping itu, target dalam Sasaran Kerja Pegawai pada bidang kepegawaian rata-rata nilainya di atas 98. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** pada tahun 2020 tercapai 100 %.
7. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, barang dan Belanja Modal dalam satu tahun anggaran** telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Uraian	Pagu	Realisasi	Prosentase
Belanja Pegawai	2.079.091.000	1.921.930.399	80.30
Belanja Barang	975.414.000	994.153.882	99.89
Belanja Modal	1.196.353.000	1.196.352.689	100

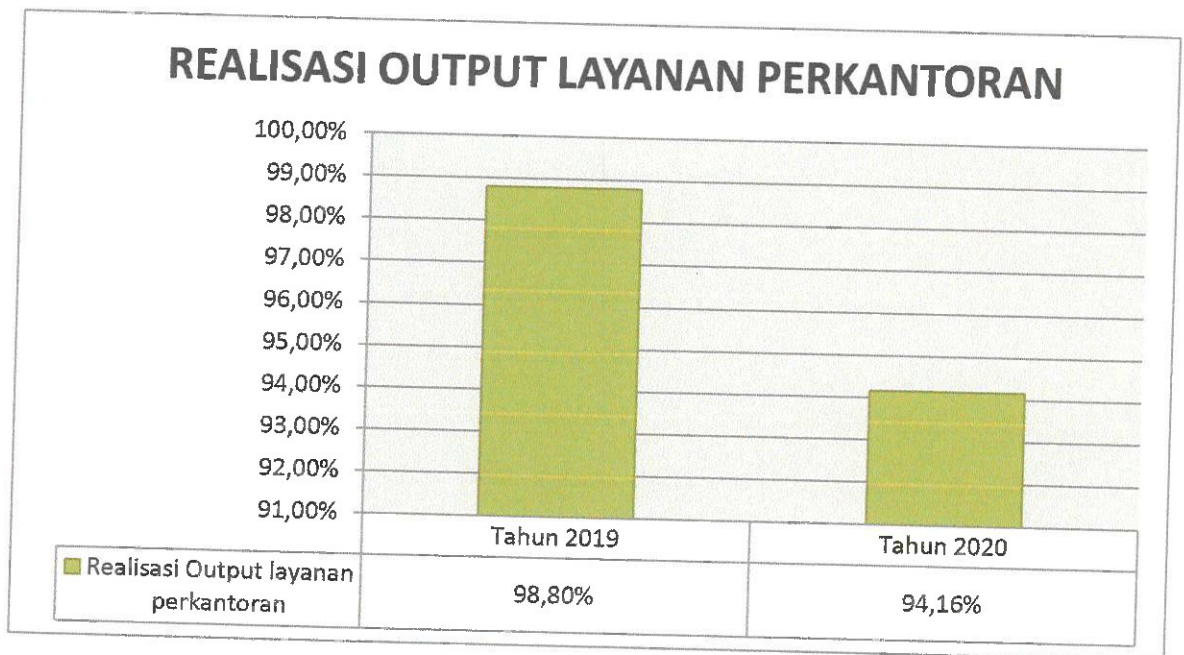
(sumber data : Laporan Keuangan 2017)

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Ket . dalam hitungan ribuan rupiah

Komposisi perbandingan target kinerja realisasi belanja anggaran belanja pegawai dan belanja barang dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sasaran Strategis 11 : Peningkatan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase tercapainya implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur	98 %	98 %	100 %
2	Prosentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian	100 %	100 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase tercapainya implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur** tahun 2020 sudah memenuhi target. Hal tersebut disebabkan masih adanya review (penyempurnaan) terhadap Indikator Kinerja Utama tahun 2020, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kinerja institusi yang akan dicapai. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase tercapainya implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur** tahun 2020 baru tercapai sebesar 98%.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi** pada tahun 2020 telah memenuhi target. Hal tersebut terbukti, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi menjadi bahan untuk evaluasi bagi satker dan stakeholder (pemangku kepentingan) Mahkamah Syar'iyah Idi terhadap pelaksanaan kinerja satker dalam satu tahun. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi** tahun 2020 tercapai sebesar 100%.
3. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian** pada tahun 2020 telah memenuhi target. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Keuangan dan BMN Mahkamah Syar'iyah Idi, tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam laporannya (Audited).

Sasaran Strategis 12 : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi

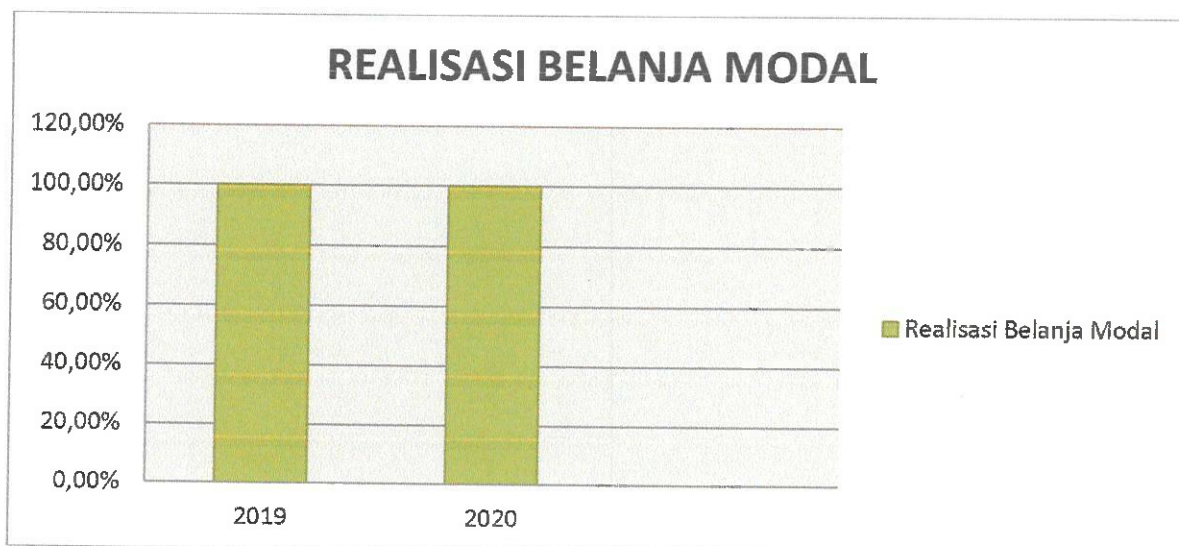
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran	100 %	99 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi** tahun 2020 sudah memenuhi target. Hal tersebut disebabkan Mahkamah Syar'iyah Idi selaku Unit Layanan Pengadaan sudah memanfaatkan Pokja dalam pengadaan barang/jasa melalui LPSE Mahkamah Agung RI. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi** tahun 2020 tercapai sebesar 100%.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran** pada tahun 2020 telah melebihi target, yaitu anggaran sarana dan prasarana kantor . Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran** tahun 2020 tercapai sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian **prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran** tahun 2020, sama, Untuk lebih jelas melihat perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran	100%	100 %	0 %

Komposisi perbandingan target kinerja realisasi belanja modal dapat dilihat pada grafik berikut :



B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja Mahkamah Syar'iyah Idi adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Mahkamah Syar'iyah Idi, antara lain sebagai berikut :

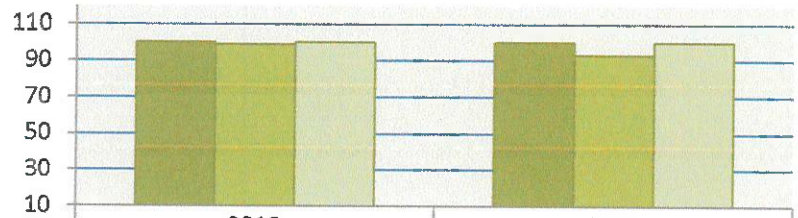
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2020. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2020 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut :

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	3.054.505.000	36.750.000	100
2	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.054.505.000	2.686.458.812	93,04
	Program peningkatan Sarana dan prasarana	1.196.353.000	1.196.353.000	100

3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.196.353.000	1.196.353.000	100
---	--	---------------	---------------	-----

PENYERAPAN ANGGARAN PER-PROGRAM



	2019	2020
■ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100	100
■ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	98,80	93,04
■ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	100	100

A. Simpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Mahkamah Syar'iyah Idi.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan permasalahan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Idi.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Mahkamah Syar'iyah Idi dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Mahkamah Syar'iyah Idi diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.



MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KELAS II
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KELAS II
NOMOR : W1-A14/ 98 /OT. 01.2/I/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI
KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KELAS II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2021 dipandang perlu menunjuk Tim penyusunan Dokumen SAKIP pada Mahkamah Syar'iyah Idi.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
6. Peraturan Menteri pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan : 1 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003.a/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI TENTANG**
: **TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2020 PADA**
: **MAHKAMAH SYAR'YAH IDI.**
- KESATU : Menunjuk nama- nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim penyusunan Dokumen SAKIP pada Mahkamah Syar'iyah Idi.
- KEDUA : Tim penyusunan Dokumen SAKIP pada Mahkamah Syar'iyah Idi mempunyai tugas menghimpun bahan, mengevaluasi dan menyusun Dokumen SAKIP Mahkamah Syar'iyah Idi yang terdiri dari :
1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 2. Reviu Rencana Strategis 2015-2019 (RENSTRA)
 3. Perjanjian Kinerja 2021 (PKT)
 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 .

KETIGA

: Dalam Melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Idi dan menyelesaikan tugas selambat-lambatnya pada minggu ke tiga bulan Pebruari 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Idi,

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,


HASANUDDIN, S.H.I, M.Ag.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :

3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, di Banda Aceh;
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KELAS II
NOMOR : W1-A14/ 98 /OT.01.2/IX/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2021

TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KELAS II

	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	Hasanuddin, S.H.I, M.Ag NIP.197012201994021001	Ketua	Pembina
2.	Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H. NIP. 197911082007041001	Wakil Ketua	Pembina
3.	Nawawi, SH NIP.196212311992031043	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
	Nizar, S.Ag NIP.197107181991031001	Sekretaris	Koodinator Kesekretariatan
4.	Jamhur, SH NIP.197107181991031001		Penyaji Data Bagian Hukum
5.	T. Iskandar, S.HI. NIP.197609231994031001	Panitera Muda Permohonan	Penyaji Data Bagian Perdata (Gugatan dan Permohonan)
	Hendra Saputra, SH NIP.197609231994031001	Panitera Muda Jinayah	Penyaji Data Bagian Jinayah
6.	Muliadi, S.HI NIP.197103181995031002	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Penyaji Data Bagian Umum dan Keuangan
7.	Hasrati, A.Md NIP.197006081993031001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penyaji Data Kepegawaian dan Ortala
8.	Inafisah, SH NIP. 196909231992032002	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penyaji Data Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan /Operator

Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi

HASANUDDIN, S.H.I, M.Ag